



SELAS, 18 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Rp 10,7 Triliun Mengucur

BENGKULU - Provinsi Bengkulu telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019. Baik itu dana yang dikelola oleh pemerintah daerah, maupun intransi vertikal. Total yang mengucur ke Provinsi Bengkulu mencapai Rp 10,79 triliun. Seperti disampaikan Kepala Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bengkulu Ismed Saputra, SE, MM usai



ISMED SAPUTRA

acara menyerahkan DIPA di Gedung Pola Provinsi. Hadir pula Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA. Kemudian DIPA itu diserahkan ke pimpinan instansi vertikal dan juga para bupati dan walikota. Ismed mengatakan total DIPA yang masuk ke Provinsi Bengkulu sebanyak 364 DIPA.

► Baca RP 10,7 T...Hal 11



SELAS, 18 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Rp 10,7 Triliun Mengucur

Sambungan dari halaman 1

Diantaranya untuk DAU Rp 6,6 triliun, DBH Pajak Rp 162,9 miliar, DBH SDA Rp 176,5 miliar, DAK Fisik Rp 1,23 triliun, DAK Non Fisik Rp 1,43 triliun, DID Rp 46,2 miliar, dan Dana Desa Rp 1,079 triliun. Termasuk DIPA untuk instansi vertikal. "Ada kenaikan 14 persen dari tahun lalu untuk Provinsi Bengkulu," terang Ismed.

Dia berharap, pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang menerima DIPA tersebut untuk bisa menyerap anggaran dengan baik. Jangan sampai terjadi keterlambatan penyerapan sehingga secara akuntansi akan membuat buruk pelaporannya. "Jika di instansi pusat seperti Kementerian Keuangan itu ada sanksinya jika dananya tidak terserap. Sanksinya pemblokiran dana tahun depan sesuai dengan dana yang sekarang tidak terserap. Jika diblokir jadi tidak bisa digunakan. Kalau di tingkat daerah belum ada sanksi, itu tergantung dari kebijakan gubernur," terangnya.

Ismed menjelaskan, ada kenaikan DAK Fisik dari Rp 759 miliar di tahun 2018, menjadi Rp 1,22 triliun di tahun 2019. Kemudian Dana Desa juga meningkat dari Rp 946 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 1,079 triliun di tahun 2019. Pemerintah daerah harus bisa memacu penyerapan dana ini. Sebab di tahun 2018 ini realisasi DAK fisik baru Rp 566 miliar atau serapannya berada di angka 74,25 persen.

Kemudian Dana Desa serapannya sudah 99,52 persen atau Rp 941 miliar. Namun untuk Dana Desa, walaupun serapannya sudah tinggi, ada sekitar Rp 200 miliar yang belum ditransfer ke kas desa dari kas daerah. "Kita harus genjot untuk serapan anggarannya," terangnya.

Sementara itu Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan kalau Provinsi Bengkulu akan menyerap anggaran dari pusat tersebut. "Kita akan memanfaatkan anggaran ini sesuai dengan peruntukannya," terangnya.

Ketika disinggung masalah serapan APBD Provinsi tahun ini masih rendah, Rohidin menjelaskan memang saat ini serapan anggaran terlihat masih sangat rendah. Per evaluasi terakhir terhadap serapan anggaran, baru 74 persen pencapaiannya. Menurut Rohidin ada beberapa penyebab yang membuat serapan anggaran hingga hampir akhir tahun ini rendah. Pertama rekanan yang mengerjakan sejumlah proyek di Pemda Provinsi Bengkulu tersebut malas menagih atau mencairkan setiap termin pekerjaan. Ini yang menjadi penyebab utama serapan rendah itu. "Setelah mencairkan uang muka, rekanan malas mencairkan termin," katanya.

Berdasarkan hasil rapat Tepra Kamis (13/12) malam lalu, serapan APBD masih di angka 74 persen. Artinya dari total APBD 2018 Rp 3,38 triliun, yang baru berhasil dibelanjakan Rp 2,47 triliun. Ada sebanyak Rp 869 miliar yang belum terserap.

Sambung Rohidin, Kebanyakan pola rekanan adalah menunggu hingga akhir tahun atau setelah selesai pekerjaannya baru dia melakukan penagihan. Saat itu nanti akan terjadi lonjakan pencairan anggaran sesuai dengan permintaan pencairan anggaran tersebut. Tentu saja akan mempengaruhi kualitas serapan anggaran secara keseluruhan. Rohidin yakin, jika serapan anggaran nanti akan mencapai 90 persen. "Kami tetap yakin, kalau serapan anggaran kita akan mencapai angka 90 persen," terangnya.

Menurutnya saat ini pekerjaan proyek fisik di lapangan terus berlangsung. "Pekerjaan masih berlangsung," katanya.

Dia mengatakan, ada arahan dari Presiden RI dan juga Kementerian Keuangan supaya di akhir tahun ini memantapkan perencanaan. Sehingga proses lelang barang dan jasa biosa segera dimulai. "Jadi mulai aktifkan ULP kemudian e katalog termasuk SK Pejabat pengelola keuangan juga harus sudah diselesaikan. Sehingga bisa memulai proses lelang pekerjaan," katanya.

Selain itu juga diminta untuk koordinasi dan sinergi terkait pengawasan keuangan. Untuk berkoordinasi dengan TP4D, BPK dan BPKP untuk pengawasan. Sehingga persoalan bisa diminimalisir. "Kalau kedua hal ini bisa dilakukan secara baik, akhir Desember awal Januari proyek sudah bisa dilelang. Kualitas anggaran akan baik," tutupnya. (del)